

BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah disusun berdasarkan kajian internal yang meliputi analisa perkembangan ekonomi daerah serta faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Disamping itu, untuk menjamin integrasi dengan arah pembangunan nasional maka perubahan arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan perubahan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kalimantan Timur. Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan arah kebijakan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2018 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional tahun 2018.

Berikut arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2018 yang mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah nasional dan global serta tantangan yang sedang dihadapi :

- a. Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektivitas kebijakan sektor riil. Pemilihan potensi komoditas unggulan sebagai basis pengembangan wilayah merupakan bagian terpenting dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus dilakukan termasuk memberdayakan peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk. fasilitasi kemudahan dalam akses permodalan bagi UMKM, fasilitasi promosi produk produk industri dan promosi pariwisata untuk mendatangkan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara;
- b. Mendorong peningkatan pemerataan distribusi pendapatan melalui percepatan pertumbuhan ekonomi di pedesaan dan penciptaan keseimbangan pembangunan di setiap wilayah. Pengembangan kawasan-kawasan khusus seperti pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan sentra-sentra produksi andalan pada sektor-sektor potensial, percepatan pembangunan pertanian melalui program revitalisasi pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan melalui peningkatan produksi pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan diversifikasi usaha di perdesaan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan memperluas cakupan program pembangunan yang berbasis masyarakat pengembangan produk

unggulan (core business daerah) yang meliputi: agribisnis, industri, manufaktur dan pariwisata;

- c. Meningkatkan investasi daerah yang mampu memperluas kesempatan kerja dan berusaha yang pada gilirannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui perbaikan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha, baik skala usaha kecil, menengah maupun besar. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menciptakan iklim investasi dan daya tarik investasi melalui penyediaan informasi potensi daerah, penyederhanaan perijinan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu atap, membangun prasarana penunjang, melindungi kepastian hukum dan penyediaan tenaga kerja di daerah, meningkatkan produktivitas dan akses UMKM pada sumberdaya produktif serta mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak multiplier yang tinggi terhadap pendapatan masyarakat;
- d. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian daerah untuk penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dan optimalisasi pemanfaatan dana program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan dilakukan upaya peningkatan ketahanan pangan melalui pemberdayaan lumbung desa untuk mewujudkan desa mandiri pangan, dan diversifikasi pangan;
- e. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Cakupan sarana dan prasarana dasar tersebut diarahkan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar di bidang kesehatan, pendidikan, sosial ekonomi masyarakat, pekerjaan umum, perhubungan dan irigasi. Selain itu, prasarana yang dibangun juga ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas guna memperlancar aliran investasi dan produksi untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan melalui upaya pemantauan kualitas lingkungan dan rehabilitasi lahan serta penerapan sanksi bagi pelanggar masalah lingkungan.

3.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah

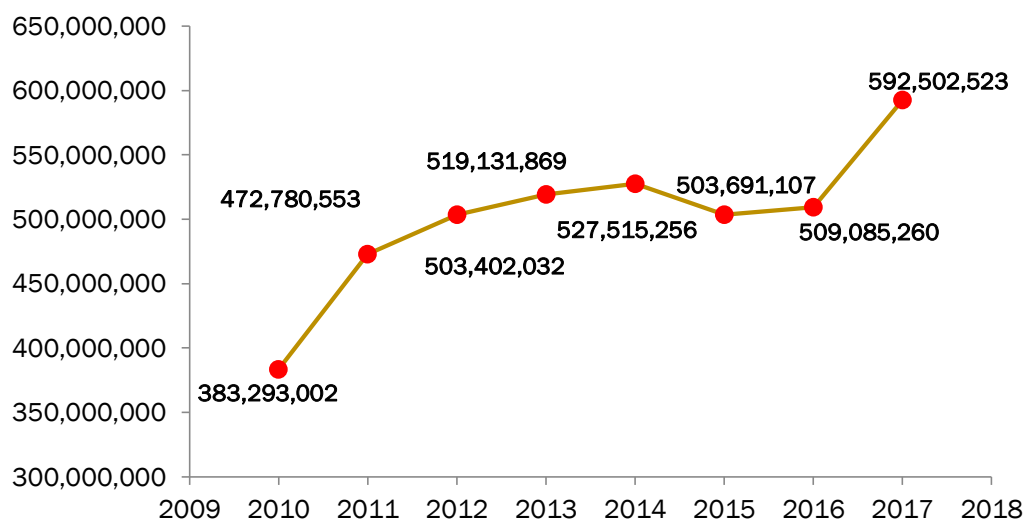
Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melakukan analisis perekonomian daerah adalah dengan melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Analisa perekonomian daerah dapat dilakukan dengan menganalisa dinamika dan struktur PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

Nilai Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan selama periode 2010 – 2014, namun pada tahun 2015 PDRB Kaltim turun menjadi Rp 503.69 trilyun. Menurunnya kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2015 merupakan dampak dari dominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang mendominasi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian adalah sektor migas dan batubara.

Gambar 3.1
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2017 (Juta Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur. 2018

Dampak dari gejolak ekonomi global dengan menurunnya harga migas dan batubara di pasar internasional merupakan faktor penyebab melemahnya kinerja sektor migas dan batubara di Kalimantan Timur pada tahun 2015. Seiring membaiknya harga minerba di pasar internasional membawa dampak positif terhadap perekonomian Kalimantan Timur yang terlihat dari meningkatnya nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 507.07 trilyun dan Rp 592.50 trilyun.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur triwulan I 2018 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Kaltim didukung oleh kinerja industri pengolahan dan perdagangan. Sementara

itu, kinerja sektor pertambangan sebagai lapangan usaha utama mengalami kontraksi. Berdasarkan pengeluaran, ekonomi Kalimantan Timur ditopang oleh konsumsi pemerintah yang sejalan dengan perkembangan proyek infrastruktur.

Pada triwulan II 2018 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi, yakni dalam rentang 2.6% - 3.0% (yoy). Di sisi lapangan usaha, lapangan usaha pertambangan masih terkontraksi namun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Membaiknya kondisi cuaca pada triwulan II diyakini akan mendukung aktivitas produksi tambang dengan jenis open pit. Lapangan usaha tersier, seperti perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan periode Ramadhan dan HBKN. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor luar negeri diperkirakan akan mengalami perbaikan meskipun masih terkontraksi. Larangan impor batubara di beberapa pelabuhan utama Tiongkok berisiko menurunkan ekspor batubara Kaltim ke negara tersebut. Selain itu, harga batubara internasional triwulan II 2018 diperkirakan tidak setinggi triwulan I 2018 sehingga menekan nilai ekspor luar negeri Kaltim.

A. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Lapangan Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, peningkatan ekonomi Kaltim triwulan I 2018 dipengaruhi oleh naiknya pertumbuhan industri pengolahan dan perdagangan. Peningkatan lapangan usaha industri pengolahan didorong oleh kinerja industri migas yang tumbuh positif pada triwulan I 2018. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari 0.7% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 1.9% (yoy). Dengan pangsa 18.8% terhadap ekonomi Kaltim triwulan I 2018, lapangan usaha industri pengolahan menyumbang andil pertumbuhan sebesar 0.4% (yoy). Sementara itu, peningkatan kinerja lapangan usaha perdagangan masih didorong oleh momentum perbaikan ekonomi Kalimantan Timur sejak akhir tahun 2017. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan lapangan usaha perdagangan yang tercatat sebesar 10.0% (yoy) di triwulan I 2018, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya berada pada angka 8.6% (yoy). Di sisi lain, lapangan usaha konstruksi mengalami deselerasi pertumbuhan pada triwulan I 2018 sesuai dengan pola seasonalnya dimana realisasi pengerjaan proyek belum banyak dilakukan pada awal tahun. Namun demikian, masih tingginya pertumbuhan konstruksi memberikan andil pertumbuhan tertinggi sebesar 0.6% (yoy) terhadap ekonomi Kaltim triwulan I 2018. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim diredam oleh terkontraksinya lapangan usaha pertambangan sebesar -2.1% (yoy) dan memberikan andil sebesar -1.02% (yoy) terhadap ekonomi Kalimantan Timur. Terkontraksinya lapangan usaha pertambangan dipengaruhi oleh penurunan produksi pertambangan nonmigas (batubara) yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang kurang baik pada triwulan I 2018. Berdasarkan pangsa, lapangan usaha pertambangan tetap menjadi

penyumbang pangsa utama bagi perekonomian Kalimantan Timur triwulan I 2018. Berdasarkan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pangsa lapangan usaha pertambangan triwulan I 2018 tercatat sebesar 46.3%. Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang pangsa sebesar 18.8% dan diikuti oleh konstruksi dan pertanian masing-masing sebesar 8.1% dan 8.0%.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2015-2018*

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.55	0.46	5.70	5.9
B	Pertambangan dan Penggalian	(4.89)	(3.52)	1.21	(2.1)
C	Industri Pengolahan	2.66	5.46	3.47	1.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30.43	8.32	6.78	12.4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.56	6.57	9.05	5.7
F	Konstruksi	(0.94)	(3.41)	9.89	8.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.42	2.75	6.53	10
H	Transportasi dan Pergudangan	2.76	3.05	7.08	9.3
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.33	3.67	9.17	10
J	Informasi dan Komunikasi	7.66	7.45	8.73	7.9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.05	1.83	(0.61)	3
L	Real Estat	3.59	(0.83)	3.35	7.0
M.N	Jasa Perusahaan	(3.75)	(4.25)	3.54	7.3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.20	(3.05)	(0.23)	8.5
P	Jasa Pendidikan	9.88	7.33	7.64	8.9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.53	9.31	7.16	8.0
R.S.T.U	Jasa Lainnya	8.81	9.65	7.98	6.8
Laju Pertumbuhan Ekonomi		(1.21)	(0.38)	3.13	1.8

B. Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Pengeluaran

Peningkatan kinerja konsumsi pemerintah triwulan I 2018 menjadi salah satu pendorong ekonomi Kaltim dari sisi pengeluaran. Konsumsi pemerintah Kaltim mengalami peningkatan dari -32.1% (yoy) di triwulan IV 2017 menjadi 11.9% (yoy) di triwulan I 2018. Naiknya konsumsi pemerintah tercermin dari belanja APBD Provinsi Kaltim yang mengalami peningkatan pada seluruh komponennya. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan konsumsi rumah tangga juga tumbuh

positif pada triwulan I 2018 namun tidak sebaik periode sebelumnya. Namun demikian, kedua komponen pengeluaran ini menjadi salah satu penyumbang andil pertumbuhan tertinggi pada triwulan I 2018. masing-masing sebesar 1.1% (yoy) dan 0.4% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan ekspor mengalami kontraksi pada triwulan I 2018 sejalan dengan penurunan kinerja lapangan usaha utama Kaltim. Penurunan ekspor Kaltim triwulan I 2018 terutama dipengaruhi oleh kinerja ekspor migas.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur berdasarkan Pengeluaran
Tahun 2015-2018*

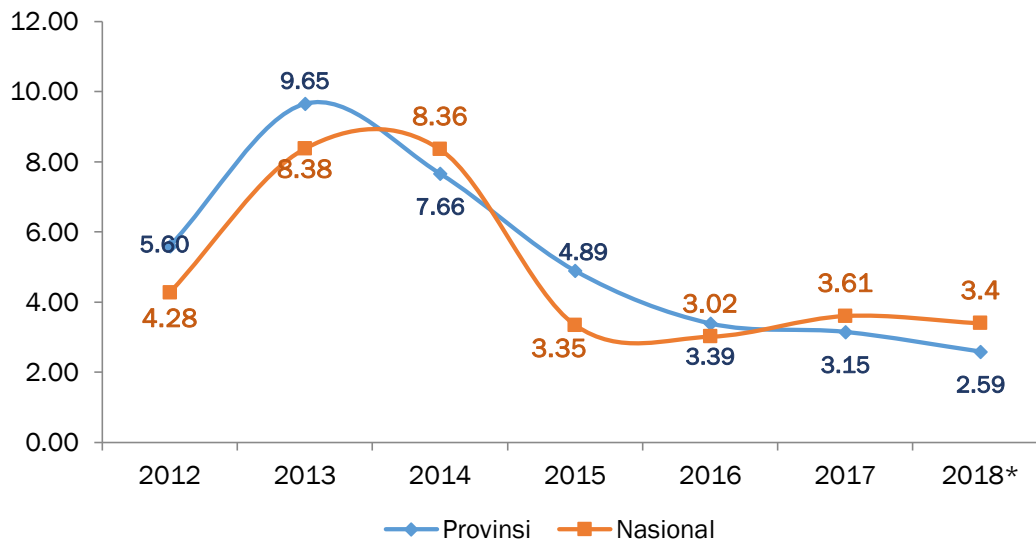
KATEGORI PENGGUNAAN	2015	2016	2017	2018*
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1.3	0.8	2.5	2.5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.3	(4.0)	4.9	10.5
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(7.8)	(13.4)	(15.3)	11.9
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	(1.5)	(6.9)	3.0	4.8
5. Perubahan Inventori	(35.9)	(65.2)	(15.8)	(38.3)
6. Ekspor Luar Negeri	(16.1)	(9.9)	2.5	(6.4)
7. Impor Luar Negeri	3.5	(12.7)	2.5	20.2
8. Net Ekspor Antardaerah	225.5	34.8	7.6	30.0

Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur (Kaltim) triwulan I 2018 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi Kaltim tercatat 2.58% (yoy) pada triwulan I 2018. Inflasi Kaltim triwulan I 2018 merupakan capaian inflasi triwulan I terendah sejak tahun 2008. Pergerakan inflasi Kaltim sejalan dengan inflasi nasional triwulan I 2018 yang turun dari 3.61% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 3.40% (yoy). Penurunan tekanan Inflasi kelompok administered prices menjadi penyebab utama turunnya inflasi Kaltim pada triwulan I 2018. Inflasi kelompok administered prices tercatat 4.78% (yoy) pada triwulan I 2018. turun dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 8.35% (yoy). Meredanya tekanan inflasi kelompok administered prices dipengaruhi oleh normalisasi tarif angkutan udara pasca libur natal dan tahun baru pada triwulan sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi juga terjadi pada kelompok inti (core inflation) yang tercatat 1.94% (yoy) pada triwulan I 2018, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2017 sebesar 2.46% (yoy). Di sisi lain, kelompok volatile food mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan I 2018 dari 0.34% (yoy) pada triwulan IV 2017 menjadi 2.16% (yoy). Lonjakan harga pada komoditas beras yang dipengaruhi oleh rendahnya pasokan seiring dengan kondisi cuaca yang kurang baik menjadi salah satu penyebab utama peningkatan inflasi kelompok volatile food. Lebih lanjut, kenaikan harga daging ayam ras yang dipengaruhi oleh harga Day-Old-

Chick (DOC) dan biaya pakan turut mendorong tekanan inflasi kelompok volatile food pada triwulan I 2018.

Gambar 3.2
Laju Inflasi Prov. Kaltim dan Nasional Tahun 2012-2018*



Inflasi Kaltim triwulan II 2018 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya pada rentang 2.51-2.91% (yoy). Pada April 2018, inflasi Kaltim tercatat 0.30% (mtm), meningkat dibandingkan inflasi Maret 2018 yang tercatat 0.05% (yoy). Sampai dengan April 2018 inflasi Kaltim tercatat 0.90% (ytd) atau secara tahunan sebesar 2.76% (yoy). Risiko inflasi Kaltim triwulan II 2018 terutama bersumber dari kelompok volatile food yang dipengaruhi oleh tingginya permintaan menjelang Ramadhan dan HBKN sesuai dengan pola seasonal-nya. Sementara itu, lonjakan permintaan angkutan udara menjelang Ramadhan dan HBKN juga menjadi faktor risiko peningkatan tekanan inflasi pada kelompok administered prices. Lebih lanjut, tarif listrik diperkirakan tetap menjadi risiko inflasi pada kelompok administered prices hingga triwulan II 2018 pasca penghapusan subsidi listrik bagi pelanggan golongan 900VA pada tahun 2017 yang lalu. Sementara itu, pergerakan inflasi inti diperkirakan masih terkendali dan stabil walaupun terdapat kecenderungan meningkat di tengah aktivitas PILKADA tahun 2018.

3.1.2. PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada Perubahan APBD TA. 2018

Perubahan kebijakan anggaran dan gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bersumber dari pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat, Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil kebijakan strategis untuk menggali potensi daerah sebagai penerimaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai urusannya dan diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Anggaran pembangunan daerah pada Kebijakan Umum APBD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 memberikan gambaran anggaran pembangunan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tambahan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sistem anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dimana pendapatan daerah tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan sehingga dalam penetapan target pendapatan harus diestimasikan secara cermat dan berhati-hati karena dapat berdampak pada sisi anggaran belanja.

Perhitungan proyeksi pendapatan P-APBD 2018 peningkatan dari Target Pendapatan APBD Murni 2018, hal ini disebabkan penyesuaian target penerimaan dengan kondisi ekonomi serta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator ekonomi makro yang telah dilakukan perubahan oleh pemerintah adalah menurunkan target pertumbuhan ekonomi, menurunkan asumsi lifting dan harga migas (Indonesian Crude Price) serta kurs rupiah terhadap dollar yang secara pasti akan mempengaruhi perekonomian daerah dan adanya SILPA Tahun 2017 sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2017 sesuai hasil audit BPK-RI.

Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Target Pendapatan Daerah pada P-APBD 2018 adalah sebesar Rp.8.84 triliun yang mendominasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), adapun uraian komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar Rp.4.63 triliun Dana Perimbangan sebesar Rp.4.16 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.37.02 miliar dan serta SILPA Belanja Pembiayaan Daerah sebesar Rp541.26 miliar sehingga total penerimaan daerah sebesar Rp9.38 triliun.

Tolak ukur kinerja Pemerintah Daerah adalah Komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Untuk komponen Pendapatan Pajak Daerah P-APBD 2018 adalah sebesar Rp.3.53 triliun pada komponen penerimaan Retribusi Daerah P-APBD 2018 sebesar Rp.19.43 miliar Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp.195.94 miliar sedangkan penerimaan pada pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.887.32 miliar.

Untuk komponen Dana Perimbangan P-APBD 2018 adalah sebesar Rp.4.16 triliun yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.2.28 triliun Penerimaan komponen DAU sebesar Rp.767.68 miliar dan Komponen DAK sebesar Rp.1.11 triliun

Selanjutnya komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebesar Rp.37.02 miliar adapun komponen tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.12.27 miliar dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp.24.75 miliar.

Sehingga secara keseluruhan target Pendapatan Daerah pada P-APBD 2018 adalah sebesar Rp.8.84 triliun meningkat sebesar Rp.477.55 miliar dari APBD Murni 2018 sebesar Rp.8.36 triliun, seperti tersaji pada tabel dibawah:

Tabel 3.3
Target Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur terhadap Perubahan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

URAIAN	RKPD 2018	P-RKPD 2018	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% TERHADAP RKPD 2018
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
PENDAPATAN DAERAH	8.366.250.000.000	8.843.805.184.518	477.555.184.518	6%
Pendapatan Asli Daerah	4.281.264.186.000	4.638.530.464.176	357.266.278.176	8%
Pajak Daerah	3.320.000.000.000	3.535.825.000.000	215.825.000.000	7%
Pajak Kendaraan Bermotor	788.000.000.000	788.000.000.000	-	0%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	575.000.000.000	620.000.000.000	45.000.000.000	8%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.750.000.000.000	2.000.000.000.000	250.000.000.000	14%
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	7.000.000.000	7.200.000.000	200.000.000	3%
Pajak Rokok	200.000.000.000	120.625.000.000	(79.375.000.000)	-40%
Retribusi Daerah	25.838.100.000	19.435.750.000	(6.402.350.000)	-25%
Retribusi Jasa Umum	11.580.000.000	9.121.250.000	(2.458.750.000)	-21%
Retribusi Jasa Usaha	13.267.100.000	9.697.000.000	(3.570.100.000)	-27%
Retribusi Perizinan Tertentu	991.000.000	617.500.000	(373.500.000)	-38%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	217.297.204.481	195.941.092.999	(21.356.111.482)	-10%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusda	214.053.497.000	193.006.348.959	(21.047.148.041)	-10%
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	3.243.707.481	2.934.744.040	(308.963.441)	-10%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	718.128.881.519	887.328.621.177	169.199.739.658	24%
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	2.500.000.000	2.500.000.000	-	0%
Penerimaan Dari Pengembalian	5.313.881.519	5.313.881.519	-	0%
Penerimaan Hasil Kerjasama Dgn Pihak Ke-3 Gedung & Parkir Mall Lembuswana	1.100.000.000	1.100.000.000	-	0%
Penerimaan Hasil Kerjasama Dengan Pt Kaltim Kariangau Terminal	3.600.000.000	3.600.000.000	-	0%
Pendapatan Blud	602.000.000.000	741.200.000.000	139.200.000.000	23%
Dana Perimbangan	4.048.252.814.000	4.168.252.814.000	120.000.000.000	3%
Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	2.162.779.786.000	2.282.779.786.000	20.000.000.000	6%

URAIAN	RKPD 2018	P-RKPD 2018	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% TERHADAP RKPD 2018
1	2	3	4	5 = (4 - 3)
Bagi Hasil Pajak	680.000.000.000	680.000.000.000	-	0%
Bagi Hasil Bukan Pajak	1.482.779.786.000	1.602.779.786.000	120.000.000.000	8%
DAU	767.682.423.000	767.682.423.000	-	0%
DAK	1.117.790.605.000	1.117.790.605.000	-	0%
Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	252.470.000.000	252.470.000.000	-	0%
Dana Alokasi Khusus (Dak) Reguler	42.085.000.000	42.085.000.000	-	0%
Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	865.320.605.000	865.320.605.000	-	0%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yg Sah	36.733.000.000.00	37.021.906.342	288.906.342	1%
Pendapatan Hibah	11.982.312.125	12.271.218.467	288.906.342	2%
Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	24.750.687.875	24.750.687.875	-	0%
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	19.294.587.875	19.294.587.875	-	0%

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Upaya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan dilakukan melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satunya dengan pemberlakuan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemberian Pembebasan Pokok. Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kepemilikan Kedua Dan Seterusnya Serta Pemberian Pembebasan Pokok. Sanksi Administrasi Berupa Denda Dan Bunga Pajak Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Di Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan dengan diberlakukannya Pergub ini dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terhutang. Selain meningkatkan penerimaan dari sisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga mengurangi piutang pajak kendaraan bermotor itu sendiri;
- Meningkatkan pelayanan dan sosialisasi kepada wajib pajak maupun wajib retribusi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengolahan aset untuk meningkatkan pendapatan;
- Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan konsisten di bidang Pendapatan

Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Teknis, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan, Unsur Pengawas Internal dan Eksternal;

- e. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- f. Melakukan update kompetensi SDM pengelola E-Samsat dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- g. Melakukan pengembangan pembayaran melalui layanan E-Channel dan SMS Banking dengan unsur perbankan;
- h. Melakukan pengembangan Delivery Service dengan PT. Pos Indonesia;
- i. Melakukan pengembangan layanan Sistem Reminder;
- j. Pengembangan info Pajak melalui Mobile Phone;
- k. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah.

3.1.3. PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah

Pada hakekatnya dasar Perubahan APBD tahun 2018 adalah penyesuaian APBD 2018 Murni dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan karena :

- a. Megakomodir Penyesuaian/Pengurangan Belanja berkenaan dengan Defisit Anggaran;
- b. Penyesuaian Belanja BLUD Atas Pengurangan Pendapatan BLUD 2018;
- c. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2017;
- d. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2018;
- e. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- f. Penyesuaian Hibah;
- g. Belanja Langsung OPD Prioritas dalam rangka memenuhi pendanaan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2013;
- h. Penyesuaian Belanja Langsung Prioritas OPD.

Perubahan pokok-pokok kebijakan daerah mempunyai implikasi pada

penurunan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menjaga kredibilitas pelaksanaan APBD tahun 2018.

Dengan memperhitungkan berbagai perubahan langkah-langkah kebijakan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang berpengaruh cukup signifikan terhadap berbagai besaran belanja yang berimplikasi pada belanja daerah, baik pada alokasi terhadap berbagai belanja daerah maka anggaran Belanja Daerah dalam P-APBD Tahun 2018 diperkirakan menjadi Rp.9,381 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp.815,13 miliar dibandingkan dengan APBD 2018 Murni sebesar Rp.8,566 triliun atau bertambah sebesar 9,52%.

Kebijakan Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan Perubahan terhadap Belanja Tidak Langsung didasarkan beberapa kriteria antara lain:

- a. Penyesuaian Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota Atas Penurunan Penyesuaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2018 dan Kekurangan Bagi Hasil Pajak APBD 2017;
- b. Penyesuaian Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS 2018;
- c. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
- d. Penyesuaian Hibah.

Dengan demikian Belanja Tidak Langsung pada Rancangan P-APBD 2018 ditargetkan Rp.5,523 triliun, bertambah Rp.329,71 miliar atau naik 6,35% dari target APBD 2018 Murni sebesar Rp.5,193 triliun dengan rincian sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Dilakukan Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan sehingga alokasi pada P-APBD 2018 menjadi Rp.1,727 triliun, bertambah sebesar Rp.54,54 miliar atau naik 3,26% dari APBD 2018 Murni sebesar Rp.1,672 triliun.

2) Belanja Hibah

Penyesuaian pada Belanja Hibah pada P-APBD 2018 sebesar Rp.1,069 miliar, naik 1,33% sebesar Rp.14,07 miliar dibanding pada APBD 2018 Murni Rp.1,055 triliun.

3) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial alokasi pada P-APBD 2018 sebesar Rp.5,80 miliar.

4) Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota

Penyesuaian Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota sehingga anggaran pada P-APBD 2018 menjadi Rp.2,123 triliun, bertambah sebesar Rp.232,69 miliar atau

naik 12,31% dari APBD 2018 Murni sebesar Rp.1,890 triliun.

5) Belanja Tidak Terduga

Penyesuaian Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi pada P-APBD 2018 menjadi Rp.17 miliar, berkurang sebesar Rp.500 juta atau turun 2,86% dari APBD 2018 Murni sebesar Rp.17,50 miliar.

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat terhadap Perubahan RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	URAIAN	RKPD 2018	P-RKPD 2018	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% TERHADAP RKPD 2018
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3 * 100)
2	BELANJA DAERAH	8.566.250.000.000	9.381.380.000.000	815.130.000.000	9.52
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.193.673.675.886	5.523.384.320.042	329.710.644.156	6.35
2.1.1	Belanja Pegawai	1.672.792.329.286	1.727.334.228.703	54.541.899.417	3.26
2.1.4	Belanja Hibah	1.055.451.599.600	1.069.527.449.600	14.075.850.000	1.33
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000	5.809.250.000	309.250.000	5.62
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	1.890.570.835.000	2.123.263.526.000	232.692.691.000	12.31
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Kabupaten/Kota & Partai Politik	551.858.912.000	580.449.865.739	28.590.953.739	5.18
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	17.500.000.000	17.000.000.000	(500.000.000)	(2.86)
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.372.576.324.114	3.857.995.679.957	485.419.355.843	14.39

3.1.4. PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pada Pembiayaan Daerah disebabkan karena Belanja BLUD Atas Penerimaan Pembiayaan (SiLPA APBD 2017). Penerimaan Pembiayaan Daerah di Tahun Anggaran P-APBD 2018 sebesar Rp.541,26 miliar.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mengajukan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2018 yang didalamnya mencakup perubahan besaran asumsi ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Tabel 3.5
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah terhadap Perubahan RKPD
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018

NO	URAIAN	RKPD 2018	P-RKPD 2018	SELISIH BERTAMBAH/ (BERKURANG)	% TERHADAP RKPD 2018
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5/3 *100)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	200.000.000.000	541.264.815.481	341.264.815.481	170,63
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000	541.264.815.481	341.264.815.481	170,63
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	-	3.690.000.000	3.690.000.000	-
3.2.2	Pembiayaan Pengeluaran	-	3.690.000.000	3.690.000.000	-
	PEMBIAYAAN NETTO	200.000.000.000	537.574.815.481	337.574.815.481	168,79